

PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DEL PIERO ANG

00000026466

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang berjudul penerapan sistem pembuktian terbalik di dalam pembuktian tindak pidana korupsi ini adalah pertama untuk mengetahui Sistem Pembalikan Beban Pembuktian di dalam Hukum Pembuktian di Indonesia dan kedua untuk mengetahui penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui bahan-bahan atau referensi bacaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif mengacu kepada penelitian perpustakaan (*library research*) terhadap keberlakuan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, maupun perjanjian-perjanjian serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, pertama bahwa sistem pembuktian terbalik di dalam sistem pembuktian di Indonesia di kenal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan hanya digunakan di dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik yang dianut oleh sistem pembuktian di Indonesia merupakan sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang yang artinya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya. Kedua, Bahwa sistem Pembuktian Terbalik diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas asal-usul aset-aset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri.

Kata Kunci : Penerapan, Pembuktian, Terbalik, Korupsi, Pidana.

APPLICATION OF A REVERSED PROOF SYSTEM IN PROVING CRIMINAL ACT OF CORRUPTION

DEL PIERO ANG

00000026466

ABSTRACT

The purpose of this research that named application of a reversed proof system in proving criminal act of corruption is first to find out the Reverse Proof System in Indonesian Proof Law and second to find out the Reverse Proof System in criminal act of corruption.

The research method used in this thesis is a normative juridical method which analyzes the problem carried out by combining legal materials which are secondary data and primary data obtained through reading materials or references. This type of normative juridical research refers to library research on the validity of legal norms contained in legislation, court decisions, as well as agreements and legal norms that exist in society.

The results obtained from this study, firstly, that the system of reversed proof in the proving system in Indonesia is known in Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Act of Corruption, and is only used in proving corruption criminal act. The reverse proof system adopted by the proof system in Indonesia is a limited and balanced reverse proof system, which means the defendant has the right to prove that he has not committed a criminal act of corruption and is obliged to provide information about all his assets. Secondly, that the Reverse Proof system is regulated in Law No.31 of 1999 in conjunction with Law No.20 of 2001 concerning the eradication of criminal act of corruption, which is actually aimed at the complete disclosure of the origin of the alleged assets of the proceeds from the corruption itself.

Keywords : Application, Reverse, Proof, Corruption, Criminal.